

INOVASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK

A. Pananrangi M

STIA Al Gazali Barru
apananrangi@algazali.ac.id

ABSTRAK

Terjadinya fenomena beberapa kebijakan yang dibatalkan atau direvisi oleh Pemerintah merupakan indikasi masih adanya tumpang tindih kebijakan dan rendahnya kemampuan berinovasi dan kemauan berinovasi pejabat publik. Untuk itu diperlukan inovasi kebijakan yang memberikan penguatan dalam menyelesaikan permasalahan ditengah masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan melakukan analisis bagaimana inovasi kebijakan dalam perspektif pendekatan administrasi publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik yang dilakukan adalah survei literatur akademis di bidang keilmuan kebijakan publik guna memperoleh konsep-konsep yang relevan dengan kajian inovasi kebijakan publik. Teknik pengumpulan data melalui penelusuran berbagai sumber dan literatur baik dari dokumen pemerintah maupun pemberitaan media massa cetak dan elektronik, jurnal dan buku-buku yang terkait dengan administrasi publik dan inovasi kebijakan. Representasi dari penerapan inovasi kebijakan melalui prinsip-prinsip inovasi NPS. Inovasi administrasi publik bertujuan untuk memodernisasi kapasitas administrasi dan menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel. Inovasi juga mempengaruhi perbaikan manajemen publik, implementasi kebijakan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Manfaat inovasi kebijakan publik percepatan proses atau prosedur kerja, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya, pengintegrasian beberapa jenis layanan menjadi

terpadu, perluasan pilihan publik terhadap barang-barang publik, penguatan public engagement dalam pengambilan keputusan atau kebijakan publik, pengurangan beban masyarakat atas layanan pemerintah, dan lainnya.

Kata Kunci: *Inovasi Kebijakan, Administrasi Publik,*

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini berbagai kebijakan publik sebagai instrumen yang mensinergikan antara peran pemerintah dan masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu Terjadinya fenomena beberapa kebijakan yang dibatalkan atau direvisi oleh Pemerintah merupakan pertanda masih adanya tumpang tindih di antara kebijakan tersebut. Selain itu fenomena tersebut mengindikasikan bahwa masih rendahnya kemauan untuk melakukan inovasi dan masih minimnya kemampuan berinovasi . Sementara itu di tengah – tengah masyarakat sedang mengemuka dinamika tuntutan kepada pemerintah untuk tampil melakukan perubahan kebijakan yang mengarah kepada perbaikan kemaslahatan hidup masyarakat luas.

Selain itu agar pemerintahan dapat berjalan efektif maka diperlukan mutu sumberdaya yang handal dari para aparatur, politisi dan birokrasi

di dalam mengelola pemerintahan yang didukung oleh daya inovatif dalam menentukan kebijakan. Artinya tanpa inovasi kebijakan publik, sulit diwujudkan pemerintahan yang efektif. Jika dikaitkan dengan penerapan otonomi daerah, maka tujuan otonomi akan sulit dcapai. Oleh sebab itu, maka diperlukan suatu langkah inovasi kebijakan yang secara substantif dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mendukung penguatan dalam menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat. Sudah tidak dapat ditawar – tawar lagi, harus segera dilakukan suatu inovasi kebijakan agar dapat diwujudkan kebijakan yang mengarah pada pencapaian Good Public Policy Governance.

1. Inovasi .

Pengertian inovasi kebijakan oleh pemerintah tercermin melalui penerapan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalamnya dijelaskan bahwa inovasi daerah diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan regulasi tersebut Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi pada semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi yang dilakukan harus ditunjang oleh komitmen dan Inisiatif yang kuat.

Inisiatif untuk melakukan Inovasi dapat berasal dari kepala daerah, DPRD, aparat sipil negara, Perangkat Daerah, dan masyarakat.

Menurut Peter Drucker (1986), bahwa setiap organisasi perlu suatu kompetensi inti (*core competence*), yaitu inovasi. Inovasi mendorong pertumbuhan organisasional, meningkatkan keberhasilan masa yang akan datang, dan merupakan mesin yang memungkinkan organisasi bertahan dari kerentanan (*viability*). Untuk menciptakan kesejahteraan dibutuhkan kemampuan baru yaitu inovasi yang memberi sumber daya kekuatan.

Menurut Ibrahim (1988 h.131), dalam Nindry Septya Pranita dkk (2008) kepekaan sebuah organisasi terhadap munculnya inovasi dipengaruhi oleh beberapa variabel berikut ini:

- a. Ukuran organisasi. Makin besar ukuran suatu organisasi, makin cepat penerimaan terhadap inovasinya
- b. Karakteristik struktur organisasi
- c. Karakteristik perorangan (pemimpin)
- d. Karakteristik eksternal organisasi

2. Kebijakan

Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai

serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Taufiqurakhman (2014) yang dimaksud kebijakan dalam Kybernology adalah sistem nilai kebijakan dan kebijaksanaan yang lahir dari kearifan aktor atau lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya kebijakan setelah melalui analisis yang mendalam dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan.

Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin (Said Zainal Abidin, 2004:31-33) dalam Taufiqurakhman (2014) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah

tentang pelaksanaan suatu undang-undang.

3. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Pengertian kebijakan menurut Carl J. Federick dalam Leo Agustino (2008: 7), bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Abdullah Ramdhani, dkk ((2017). Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2012).

Menurut (Thoha, 2012), kebijakan memiliki dua aspek yakni:

- a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah

yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.

- b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Kebijakan Publik

Thomas R. Dye, (1995) dalam Dede Mariana (2010). Kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah

untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Kemudian menurut Taufiqurakhman (2014: 4) kebijakan publik adalah serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat.

Kebijakan publik pada umumnya dilatarbelakangi oleh Isu yang cukup yang kuat terkait dengan analisis kebijakan dan didasari oleh berbagai pertimbangan tertentu. Selain itu ruang lingkup pembahasan kebijakan publik sangat luas, seperti : administrasi publik, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dan lain - lain. Kemudian kebijakan publik dari aspek hirarki, dapat mencakup nasional, regional maupun lokal. Begitu pula jika ditinjau dari aspek regulasi, mencakup : undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota

Dalam proses perumusan suatu kebijakan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Faktor penyebabnya karena di dalamnya terdapat berbagai kekuatan yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan tersebut. Misalnya, para pembuat kebijakan kadang - kadang memandang masalah politik berbeda dengan yang lain.

Menurut Luankali (2007: 5), dalam Dede Mariana (2010). bahwa proses pembuatan kebijakan publik meliputi: 1) Pembuatan kebijakan sebagai proses politik. Teori kebijakan publik menjelaskan bahwa pembuatan kebijaksanaan publik tidak dipahami secara sempit yaitu pada proses konversi saja, melainkan merupakan suatu seri aktivitas yang meliputi rangkaian aktivitas; 2) Pembuatan kebijakan sebagai tahapan atau seri aktivitas. Proses pembuatan kebijakan publik sebagai seri aktivitas meliputi beberapa tahapan seperti: a) Penyusunan agenda (perumusan masalah); b) Formulasi kebijakan (ramalan); c) Adopsi kebijakan (rekomendasi); d) Implementasi kebijakan - proses *output* (pemantauan); e) Penilaian kebijakan - proses *outcome* (evaluasi).

4. Paradigma Administrasi Publik

Sesuai historisnya dalam perspektif administrasi publik, diketahui bahwa terdapat beberapa paradigma yaitu: Old Public Administration (OPA), New Public Administration (NPA), New Public Manajemen (NPM) dan New Public Services NPS. Berdasarkan berbagai paradigma administrasi tersebut, maka paradigma New Public Services adalah yang paling tepat menerapkan prinsip-prinsip inovasi.

Menurut para ahli, melalui NPS, publik dipandang secara utuh dan humanis, tidak direduksi sebagai pelanggan yang berciri ekonomistis-egoistis maupun sebagai pihak luar yang menjadi sasaran mekanis birokrasi. Paradigma NPS juga menaruh

perhatian yang besar terhadap inovasi dan bersifat integral serta komprehensif karena NPS merupakan pendekatan yang memberikan nilai tinggi pada kolaborasi antar pihak dan peningkatan kinerja setiap elemen organisasi.

Tabel 1 Paradigma Administrasi Publik

	OPA	NPA	NPM	NPS
Arti Penting Inovasi	Kurang penting	Penting	Penting	Sangat penting
Ranah inovasi	Integral organisasi	Praktikpraktik administrasi Publik yang lebih adil dan Mampu menyelesaikan masalah publik	Hubungan organisasi publik - pelanggan	Holistik dan integral
Tujuan inovasi	Menjalankan sistem dan aturan Secara efektif	Menjalankan sistem administrasi yang sadar akan nilai dan norma	Meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja	Memenuhi kepentingan publik

Terjadinya pergeseran paradigma pemerintahan mengubah peran pemerintah dari penyedia dan pelaksana program menjadi fasilitator dan regulator. Kondisi tersebut membuat pemerintah dituntut untuk mampu menjalankan pemerintahan yang efektif dan membuat kebijakan yang pro kepada rakyat, dan salah satu

indikatornya adalah lahirnya kebijakan publik yang inovatif dari pemerintah dan pemangku kepentingan.

Adapun pergeseran paradigma dalam kebijakan publik menurut Suharto (2005) dalam Dede Mariana (2010). Dapat dilihat dalam tabe 3 berikut:

Tabel 2 Pergeseran Paradigma dalam Kebijakan Publik

ASPEK	GOVERNMENT	GOVERNANCE
Proses Perumusan	Pemerintah Kebijakan	· Pemerintah · Stakeholder · Analisis Kebijakan · Independent Think Thank
Penetapan Kebijakan	Pemerintah	Pemerintah
Analisis Kebijakan	· Pemerintah · Public contractor · Government Think Thank	· Stakeholder · Analisis Kebijakan · Independent Think Thank

Sumber : Suharto. dalam Dede Mariana (2010)

Selain itu menurut LAN. (2014). dalam Ahmad Sururi. (2017). bahwa sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah yang memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan, maka peran pejabat publik di daerah dalam melakukan inovasi kebijakan publik akan semakin meningkat dan memberikan dampak yang positif bagi kualitas kebijakan atau peraturan yang akan disusun dan telah dihasilkan. Kualitas peraturan daerah menjadi indikator penting kinerja tata pemerintahan di daerah. Akan tetapi faktanya, hampir semua pembuat kebijakan masih dominan mempertimbangkan kepentingan jangka pendek dan parsial serta belum mengedepankan budaya inovasi sehingga mengakibatkan terjadinya stagnasi kebijakan publik dan kinerja tata pemerintahan belum berjalan secara optimal.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik yang dilakukan adalah melakukan survei literatur akademis terkait pada bidang keilmuan kebijakan publik untuk memperoleh berbagai konsep yang disesuaikan dengan kajian inovasi kebijakan publik. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber yaitu :dokumen pemerintah, buku , dan jurnal. Setelah data terkumpul kemudian diolah dan digambarkan dalam bentuk narasi sesuai dengan kebutuhan data. Selanjutnya dilakukan analisis data yang didasarkan pada teori dan konsep kebijakan publik serta dilakukan proses intreprtasi data untuk penarikan kesimpulan hasil penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Inovasi Kebijakan dalam perspektif Administrasi publik

Paradigma administrasi publik berdasarkan prinsip-prinsip *New Public Services* (NPS) merupakan representasi inovasi kebijakan. Prinsip-prinsip NPS tersebut yaitu :

- a) Menekankan pada konsep hubungan kepercayaan dan kolaborasi dengan sesama warga negara dan bukan hanya sebagai pelanggan.
- b) Kepentingan publik menciptakan kepentingan dan tanggung jawab bersama.
- c) Nilai pada pelayanan publik dan komitmen warga negara untuk membuat kontribusi
- d) Berpikir strategis, bertindak demokratis
- e) Akuntabilitas tidaklah sederhana
- f) Mengarahkan dengan membantu warga negara untuk mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan bersama
- g) Menghargai orang dan tidak hanya fokus pada produktifitas

United Nations Departement of Economic And Social Affairs (2006) yang dikutip oleh Ahmad Sururi.

(2017). memberikan analisis tentang inovasi sebagai bagian dari revitalisasi administrasi publik, adanya Inovasi dan eksperimen di pemerintah pusat dan daerah khususnya di bidang pelayanan dan pada saat ini berlangsung di berbagai penjuru dunia sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk merevitalisasi administrasi publik. Pertukaran dan berbagi pengalaman inovatif ini dapat menciptakan “pengetahuan baru” yang dapat diakses oleh negara-negara di seluruh dunia

2. Prasyarat Inovasi Kebijakan Publik

Menurut Ahmad Sururi (2016), bahwa prasyarat mutlak inovasi kebijakan publik adalah terwujudnya gagasan dan ide dari pejabat publik sebagai entry point diimplementasikannya berbagai program-program dan kebijakan. Gagasan dan ide dapat terealisasikan apabila organisasi sektor publik sebagai locus pembuatan kebijakan mampu melakukan adopsi dan adaptasi terhadap perkembangan yang terjadi di luar organisasi. Mekanisme sistem organisasi sektor publik yang melibatkan lingkungan organisasi sebagai input dan proses organisasi menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari setiap perumusan kebijakan publik

3. Jenis - Jenis Inovasi Kebijakan Publik

Menurut direktori administrasi Inovasi Administrasi Negara, (2014) Terdapat beberapa jenis inovasi kebijakan publik yaitu jenis inovasi proses yang terdiri dari standar operasional prosedur, tata laksana, sistem dan prosedur. Kemudian jenis inovasi metode yang terdiri dari strategi, cara dan teknik baru. Dan jenis inovasi produk yang terdiri dari fisik (barang) maupun non fisik atau imaterial (jasa). Secara empiris, inovasi kebijakan berdasarkan proses lebih menekankan pada kualitas proses kerja baik eksternal maupun internal agar lebih sederhana dan efisien.

4. Tujuan Inovasi Kebijakan Publik

Menurut United Nations, (2006 : 2) dalam Innovation Discussion Paper, Tri Widodo Wahyu Utomo, (2016) Inovasi bertujuan untuk merevitalisasi administrasi publik, membuatnya lebih pro aktif, efisien, akuntabel dan lebih berorientasi pada pelayanan³

Menurut Mirlinda Batalli (2011) bahwa proses inovasi administrasi publik bertujuan untuk memodernisasi kapasitas administrasi dan menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel. Inovasi juga mempengaruhi perbaikan manajemen publik,

implementasi kebijakan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, peran Negara menjadi lebih sebagai “pelayan” daripada “penguasa”.

Terjadinya pergeseran paradigma pemerintahan mengubah peran pemerintah dari penyedia dan pelaksana program menjadi fasilitator dan regulator. Terjadinya pergeseran paradigma tersebut membuat pemerintah dituntut untuk mampu menjalankan pemerintahan yang efektif dan membuat kebijakan yang pro kepada rakyat, dan salah satu indikatornya adalah lahirnya kebijakan publik yang inovatif dari pemerintah dan pemangku kepentingan.

Inonasi kebijakan telah dijalankan, namun berbagai masalah di dalamnya masih menghambat. Kebijakan publik sebagai instrumen yang berfungsi menyatukan pemerintah dan masyarakat belum berjalan secara optimal. Seperti yang diungkap oleh Tri Widodo Utomo (2016) bahwa meskipun inovasi di Indonesia sudah berkembang pesat akan tetapi masih dilakukan secara relatif parsial, piecemeal dan stagnan. Parsial karena biasanya sebuah inovasi tidak otomatis terkoneksi dengan inovasi lain. Tidak terkoneksi dengan peta jalan (road map) organisasi, serta tidak memiliki visi jangka panjang. Sementara itu, sifat ‘piecemeal’ (satu

per satu) inovasi mereka karena kurang memberi efek besar dan kolektif. Akibatnya, inovasi “tidak pergi ke manamana” alias stagnan. Bahkan, rencana pembangunan lima tahunan baru mengindikasikan program sasaran strategis, namun belum mengakomodir kebutuhan inovasi dalam organisasi publik memerlukan daya kolaborasi dan elaborasi yang bersifat *enable*.

Stagnasi Inovasi Kebijakan Publik

Fakta menunjukkan bahwa banyak peraturan di daerah yang dicabut dikarenakan tidak memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menegaskan pemerintah secepatnya akan mencabut 3.266 perda yang dinilai menghambat masuknya investasi. Tjahjo menjelaskan, kategori perda bermasalah adalah menghambat investasi, perizinan, dan retribusi yang tidak perlu. Misalnya, orang yang ingin buka usaha harus diminta izin prinsip, izin usaha, izin mendirikan bangunan (IMB). (www.jawaPos.com, 13 Juni 2016). Dikutif Ahmad Sururi (2016).

Menurut Dede Mariana, (2010) dalam Ahmad Sururi (2016), bahwa terhambatnya kebijakan publik melakukan perubahan disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya seperti rendahnya kapasitas pejabat publik, budaya birokrasi yang antipati terhadap

perubahan dan struktur birokrasi yang cenderung kaku dan kurang fleksibel. Dalam kasus tertentu, banyak terjadi orientasi kebijakan publik yang berbeda antara pemerintah dan publik terutama dalam proses formulasi kebijakan sehingga menyebabkan ketidakharmonisan pada tataran implementasi. Pemerintah berorientasi kepada bagaimana membelanjakan anggaran supaya terserap dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kerap kali lalai terhadap program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik. Kondisi tersebut memaksa publik untuk tetap patuh terhadap kebijakan dari pemerintah yang tidak memberikan dampak dan manfaat kepentingan publik

5. Manfaat Inovasi Kebijakan Publik

Menurut Tri Widodo Wahyu Utomo, (2016), bahwa manfaat inovasi dapat diidentifikasi dalam beberapa manifestasi, antara lain: percepatan proses atau prosedur kerja, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya, pengintegrasian beberapa jenis layanan menjadi terpadu, perluasan pilihan publik (*public choice*) terhadap barang-barang publik (*public goods*), penguatan *public engagement* dalam pengambilan keputusan atau kebijakan publik, pengurangan beban

masyarakat atas layanan pemerintah, serta model- model manfaat lain yang terus berkembang sesuai dinamika kebutuhan organisasi publik dan kalangan stakeholder-nya.

Selain itu menurut LAN. (2014). dalam Ahmad Sururi. (2017). bahwa sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah yang memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan, maka peran pejabat publik di daerah dalam melakukan inovasi kebijakan publik akan semakin meningkat dan memberikan dampak yang positif bagi kualitas kebijakan atau peraturan yang akan disusun dan telah dihasilkan. Kualitas peraturan daerah menjadi indikator penting kinerja tata pemerintahan di daerah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa pembahasan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan terkait inovasi kebijakan publik dalam perspektif administrasi publik, yaitu :

1. Terjadinya fenomena beberapa kebijakan yang dibatalkan atau direvisi oleh Pemerintah merupakan indikasi masih adanya tumpang tindih kebijakan dan rendahnya kemampuan berinovasi

dan kemauan berinovasi pejabat publik. Untuk itu diperlukan inovasi kebijakan yang secara substantif dapat memberikan penguatan dalam menyelesaikan permasalahan ditengah masyarakat

2. Paradigma administrasi publik berdasarkan prinsip-prinsip New Public Services (NPS) merupakan representasi inovasi kebijakan. yaitu :

- a) Menekankan pada konsep hubungan kepercayaan dan kolaborasi dengan sesama warga negara dan bukan hanya sebagai pelanggan.

- b) Kepentingan publik menciptakan kepentingan dan tanggung jawab bersama.

- c) Nilai pada pelayanan publik dan komitmen warga negara untuk membuat kontribusi

- d) Berpikir strategis, bertindak demokratis

- e) Akuntabilitas tidaklah sederhana

- f) Mengarahkan dengan membantu warga negara untuk mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan bersama

- g) Menghargai orang dan tidak hanya fokus pada produktifitas

3. Inovasi administrasi publik bertujuan untuk memodernisasi

kapasitas administrasi dan menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel. Inovasi juga mempengaruhi perbaikan manajemen publik, implementasi kebijakan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi

4. Manfaat inovasi kebijakan publik dapat diidentifikasi dalam beberapa manifestasi, antara lain: percepatan proses atau prosedur kerja, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya, pengintegrasian beberapa jenis layanan menjadi terpadu, perluasan pilihan publik (public choice) terhadap barang-barang publik (public goods), penguatan public engagement dalam pengambilan keputusan atau kebijakan publik, pengurangan beban masyarakat atas layanan pemerintah, serta model- model manfaat lain yang terus berkembang sesuai dinamika kebutuhan organisasi publik dan kalangan stakeholder-nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sururi (2017). *Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual Dan Empiris)*. Universitas Serang Raya
- Abdullah Ramdhani, dkk . 2017. *Jurnal. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Program Studi Administrasi Publik, Universitas Garut. Vol. 11; No. 01. ISSN. 1412 – 7083.*
- Batalli, Mirlinda 2011. *Impact of Public Administration Innovations on Enchancing the Citizens" Expectation*, International Journal of e-Education, e-Bussines, e- Manajemen and e-Learning, Vol 1 No 2.
- Drucker, Peter., 1986. *Innovation and Entrepreneurship*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dede Mariana .2010 *jurnal . Otonomi Daerah Dan Inovasi Kebijakan. governance, Vol. 1, No. 1.*
- Departement of Economic And Social Affairs, 2006. *Innovation in Governance and Public Administration : Replicating what works*, United Nations, New York
- Iskandar, J. (2012). *Kapita Selektta teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.

- Leo Agustino, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*
- Nindry Septya Pranita, Siti Rochmah, Sukanto. 2008. *Jurnl. Administrasi Publik (Jap), Inovasi Administrasi Kepegawaian Dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu)*. Vol. 3, No. 12, Hal. 2008-2013
- Pusat Inovasi Tata Pemerintahan Deputi Inovasi Administrasi Negara, 2014, *Handbook Administrasi Negara*, (Lembaga Administrasi Negara Pusat Intan - Dian - LAN), hal 16
- Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*
- Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan publik. Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)
- Thoha, M. (2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widodo Tri Utomo, 2016. *Inovasi sebagai keniscayaan baru dalam Ilmu dan Praktek Administrasi Publik di Indonesia*, Laskar Inovasi Deputi Inovasi Administrasi Negara, Jakarta.
- Sumber Lain:
- UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah